1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

No	Komoditas	JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		Δ TW III
		M2	M4	M2	M4	M2	M4	
1	**Beras Medium**	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	**0,00%**
2	**Beras Premium**	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	**0,00%**
3	**Cabai Merah**	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000	40.000	**0,00%**
4	**Bawang Merah**	45.000	35.000	32.000	35.000	32.000	32.000	**-28,89%**
5	**Daging Ayam Broiler**	32.000	36.000	42.000	40.000	38.000	37.000	**+15,63%**
6	**Telur Ayam Ras**	24.000	27.000	25.000	25.000	27.000	25.000	**+4,17%**
7	**Daging Sapi**	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	**+3,70%**
8	**Gula Pasir Lokal**	17.500	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000	**+2,86%**
9	**Bawang Putih**	40.000	35.000	34.000	35.000	35.000	35.000	**-12,50%**
10	**Cabai Rawit Merah**	48.000	50.000	50.000	65.000	75.000	75.000	**+56,25%**
11	**Minyak Goreng (Kemasan)**	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	24.000	**+9,09%**
12	**Minyak Goreng (Curah)**	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	**-4,55%**
13	**Mi Instan**	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**0,00%**
14	**Susu Bubuk**	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	**0,00%**
15	**Ikan Kembung**	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	**+9,09%**
16	**Tempe 1 Kg**	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	**+8,33%**
17	**Tepung Terigu Segitiga Biru**	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	**+20,00%**
18	**Udang**	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	**+10,00%**
19	**Tahu Mentah 1 Kg**	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	**0,00%**
20	**Pisang 1 Kg**	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	**+16,67%**
21	**Susu Balita (SGM) 400 Gr**	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	**0,00%**
22	**Jeruk 1 Kg**	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000	23.000	**+27,78%**

Berdasarkan hasil survei harga kebutuhan pokok di Pasar Banjar dan rekapitulasi data Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SiLinda Jabar), perkembangan harga pangan selama Juli – September 2026 menunjukkan pergerakan yang cukup fluktuatif, dengan kecenderungan peningkatan harga pada sejumlah komoditas strategis menjelang akhir triwulan III. Pada Juli, sebagian besar komoditas relatif stabil, meskipun terjadi kenaikan harga pada kelompok protein hewani dan penurunan pada beberapa komoditas hortikultura. Memasuki Agustus, tekanan harga mulai meningkat, terutama pada cabai rawit merah, sementara komoditas lainnya mengalami pergerakan yang bervariasi. Pada September, sejumlah komoditas kembali mengalami kenaikan harga, sedangkan beberapa kebutuhan pokok lainnya relatif stabil.

Pada Juli, kenaikan harga terutama terjadi pada daging ayam broiler dari Rp32.000 menjadi Rp36.000/kg (12,50%), telur ayam ras dari Rp24.000 menjadi Rp27.000/kg (12,50%), daging

sapi dari Rp135.000 menjadi Rp140.000/kg (3,70%), serta cabai rawit merah dari Rp48.000 menjadi Rp50.000/kg (4,17%). Sebaliknya, penurunan harga cukup signifikan terjadi pada bawang merah dari Rp45.000 menjadi Rp35.000/kg (−22,22%), cabai merah dari Rp40.000 menjadi Rp35.000/kg (−12,50%), dan bawang putih dari Rp40.000 menjadi Rp35.000/kg (−12,50%). Penurunan harga bawang merah berkaitan dengan meningkatnya pasokan dari daerah penghasil akibat panen raya, sedangkan kenaikan harga daging ayam dan telur ayam ras antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan setelah berakhirnya masa libur sekolah, termasuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, harga beras, gula pasir, minyak goreng kemasan, serta sebagian besar produk pangan olahan relatif stabil.

Pada Agustus, tekanan harga terutama terlihat pada kelompok hortikultura, khususnya cabai rawit merah yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp50.000 menjadi Rp65.000/kg (30,00%). Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dari Rp32.000 menjadi Rp35.000/kg (9,38%), jeruk dari Rp19.000 menjadi Rp20.000/kg (5,26%), serta bawang putih dari Rp34.000 menjadi Rp35.000/kg (2,94%). Di sisi lain, cabai merah mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp35.000/kg (−12,50%) dan daging ayam broiler turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000/kg (−4,76%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga belum terjadi secara merata pada seluruh komoditas, tetapi lebih terkonsentrasi pada beberapa bahan pangan bergejolak (volatile food), terutama kelompok cabai. Perubahan harga tersebut perlu menjadi perhatian karena komoditas hortikultura memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi pasokan dan distribusi dari daerah penghasil.

Memasuki September, perkembangan harga menunjukkan kenaikan pada beberapa komoditas pangan. Pisang mengalami kenaikan dari Rp6.000 menjadi Rp7.000/kg (16,67%), udang dari Rp100.000 menjadi Rp110.000/kg (10,00%), jeruk dari Rp21.000 menjadi Rp23.000/kg (9,52%), serta minyak goreng kemasan dari Rp22.000 menjadi Rp24.000 (9,09%). Sementara itu, harga daging ayam broiler mengalami penurunan dari Rp38.000 menjadi Rp37.000/kg (−2,63%) dan telur ayam ras dari Rp27.000 menjadi Rp25.000/kg (−7,41%). Harga cabai rawit merah relatif stabil sepanjang periode pengamatan September pada tingkat Rp75.000/kg, tetapi masih tergolong tinggi dibandingkan dengan awal triwulan. Adapun komoditas seperti beras medium, beras premium, daging sapi, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan sebagian besar produk pangan olahan tidak mengalami perubahan harga antara minggu kedua dan minggu keempat September.

Secara kumulatif, dari Juli minggu kedua hingga September minggu keempat, kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah sebesar 56,25%, diikuti jeruk sebesar 27,78%, tepung terigu Segitiga Biru sebesar 20,00%, pisang sebesar 16,67%, daging ayam broiler sebesar 15,63%, dan udang sebesar 10,00%. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kemasan dan ikan kembung masing-masing sebesar 9,09%, tempe sebesar 8,33%, telur ayam ras sebesar 4,17%, daging sapi sebesar 3,70%, serta gula pasir sebesar 2,86%. Sebaliknya, penurunan harga terbesar terjadi pada bawang merah sebesar 28,89%, diikuti bawang putih sebesar 12,50% dan minyak goreng curah sebesar 4,55%. Sementara itu, beras medium, beras premium, cabai merah, mi instan, susu bubuk, tahu, dan susu balita relatif stabil jika dibandingkan antara awal dan akhir triwulan. Persentase kumulatif tersebut menggambarkan perubahan dari titik awal hingga akhir periode, sehingga tidak mencerminkan seluruh fluktuasi yang terjadi di antara kedua waktu pengamatan.

Secara keseluruhan, perkembangan harga pangan selama Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga terutama berasal dari komoditas hortikultura,

khususnya cabai rawit merah, serta beberapa komoditas pangan lainnya yang mengalami peningkatan harga menjelang akhir September. Pergerakan harga tersebut mencerminkan adanya dinamika permintaan, ketersediaan pasokan, serta perubahan harga di tingkat produsen dan distributor. Meskipun sejumlah komoditas kebutuhan pokok masih menunjukkan harga yang relatif stabil, peningkatan harga cabai rawit merah dan beberapa komoditas strategis lainnya tetap perlu diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemantauan harga secara berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan daerah pemasok, serta optimalisasi langkah stabilisasi harga dan kelancaran distribusi guna mengantisipasi potensi tekanan inflasi pada Triwulan IV Tahun 2026

a. IPH Kota Banjar Triwulan II 2026

Secara keseluruhan, pergerakan IPH Kota Banjar selama Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan adanya perubahan tekanan harga pangan yang cukup signifikan. Pada Juli, IPH masih berada pada zona negatif, tetapi menunjukkan tren peningkatan dari -4,62 pada minggu pertama menjadi -2,48 pada minggu kelima, yang mengindikasikan mulai berkurangnya kecenderungan penurunan harga. Memasuki Agustus, IPH berbalik ke zona positif dan terus meningkat dari 1,68 menjadi 2,63, mencerminkan menguatnya tekanan kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis. Sementara itu, pada September, IPH tetap berada pada zona positif dengan peningkatan dari 1,05 menjadi 1,51, meskipun masih lebih rendah dibandingkan puncak Agustus. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga pangan masih berlangsung hingga akhir triwulan, terutama pada kelompok komoditas pangan bergejolak.

Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Banjar perlu terus diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat koordinasi dan pemantauan harga secara berkelanjutan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada komoditas pangan bergejolak, terutama cabai rawit merah, daging ayam broiler, dan komoditas strategis lainnya yang mengalami kenaikan harga, agar potensi tekanan inflasi pada Triwulan IV Tahun 2026 dapat diantisipasi secara lebih dini melalui langkah pengendalian yang tepat sasaran.

1) Juli 2026

Pada bulan Juli 2026, IPH Kota Banjar masih berada pada zona negatif, tetapi menunjukkan tren peningkatan secara konsisten sepanjang lima minggu pemantauan. Pada minggu pertama, IPH tercatat sebesar -4,62, kemudian meningkat menjadi -3,88 pada minggu kedua, -3,15 pada minggu ketiga, -2,82 pada minggu keempat, hingga mencapai -2,48 pada minggu kelima. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan harga pangan mulai berkurang secara bertahap, meskipun secara umum IPH masih berada pada zona negatif.

Kondisi tersebut sejalan dengan pergerakan harga beberapa komoditas strategis yang mulai mengalami kenaikan, terutama daging ayam broiler, telur ayam ras, dan cabai rawit merah. Kenaikan harga daging ayam dan telur ayam antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan setelah berakhirnya masa libur sekolah, termasuk kembali meningkatnya kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan bawang putih mengalami penurunan harga yang turut menahan tekanan kenaikan harga secara keseluruhan. Dengan demikian, perkembangan IPH Juli menunjukkan mulai berkurangnya tekanan penurunan harga, meskipun kondisi harga pangan secara umum masih relatif terkendali.

2) Agustus 2026

Memasuki bulan Agustus 2026, IPH Kota Banjar mengalami perubahan arah yang cukup signifikan dari zona negatif menjadi positif. Pada minggu pertama, IPH tercatat sebesar 1,68, kemudian meningkat menjadi 2,16 pada minggu kedua, 2,53 pada minggu ketiga, dan mencapai 2,63 pada minggu keempat. Peningkatan secara berkelanjutan ini menunjukkan semakin menguatnya tekanan kenaikan harga pangan, dengan nilai IPH pada minggu keempat Agustus menjadi yang tertinggi selama Triwulan III Tahun 2026.

Perkembangan tersebut sejalan dengan kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, terutama cabai rawit merah yang mengalami kenaikan sebesar 30,00%, diikuti bawang merah dan beberapa komoditas hortikultura lainnya. Kenaikan harga pada kelompok pangan bergejolak (volatile food) menunjukkan adanya tekanan yang perlu diwaspadai, terutama berkaitan dengan perubahan kondisi pasokan dan harga dari daerah pemasok. Meskipun beberapa komoditas seperti cabai merah dan daging ayam broiler mengalami penurunan harga, kenaikan pada komoditas tertentu tetap menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi daerah. Oleh karena itu, perkembangan IPH Agustus menunjukkan perlunya peningkatan pemantauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi untuk mengantisipasi berlanjutnya tekanan kenaikan harga pangan.

3) September 2026

Pada bulan September 2026, IPH Kota Banjar masih berada pada zona positif, tetapi dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan puncak IPH pada Agustus. Pada minggu pertama, IPH tercatat sebesar 1,05, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 1,30 pada minggu kedua, 1,42 pada minggu ketiga, dan mencapai 1,51 pada minggu keempat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga pangan masih berlangsung hingga akhir Triwulan III, meskipun intensitasnya relatif lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Kondisi tersebut sejalan dengan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, antara lain pisang, jeruk, udang, dan minyak goreng kemasan. Sementara itu, harga cabai rawit merah relatif stabil selama periode pemantauan September, tetapi masih berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan awal triwulan, sehingga tetap berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan harga pangan. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging ayam broiler dan telur ayam ras mengalami penurunan harga, sedangkan beras, gula pasir, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya relatif stabil. Secara umum, perkembangan IPH September menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga belum sepenuhnya mereda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan potensi gejolak harga komoditas pangan strategis menjelang Triwulan IV Tahun 2026

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

    - Volatilitas harga komoditas hortikultura masih menjadi permasalahan utama dalam pengendalian inflasi daerah. Selama Triwulan III Tahun 2026, cabai rawit merah mengalami kenaikan harga cukup signifikan, dari Rp48.000/kg pada Juli minggu kedua menjadi Rp75.000/kg pada September minggu keempat atau meningkat sebesar 56,25%. Sementara itu, bawang merah mengalami penurunan sebesar 28,89% secara kumulatif, meskipun sempat mengalami kenaikan pada Agustus. Cabai merah juga menunjukkan fluktuasi harga selama Juli dan Agustus sebelum relatif stabil pada September. Kondisi

ini menunjukkan bahwa stabilitas harga komoditas hortikultura masih rentan terhadap perubahan pasokan dan dinamika harga di tingkat pemasok, sehingga memerlukan pemantauan dan langkah antisipasi yang lebih responsif.

- Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi faktor kerentanan terhadap gejolak harga. Kota Banjar masih mengandalkan sejumlah sentra produksi dari daerah lain, seperti pasokan cabai merah dan cabai rawit merah dari Garut dan Wonosobo, bawang merah dari Garut, Sumenep, Brebes, dan Majalengka, serta bawang putih dari Solo, Cirebon, dan Surabaya. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan harga pangan di Kota Banjar cukup sensitif terhadap perubahan produksi, ketersediaan pasokan, harga di tingkat petani, dan biaya distribusi dari daerah pemasok. Kenaikan harga cabai rawit merah selama Triwulan III menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antardaerah untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas strategis.
- Fluktuasi harga komoditas protein hewani menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Harga daging ayam broiler mengalami kenaikan dari Rp32.000/kg pada Juli minggu kedua menjadi Rp37.000/kg pada September minggu keempat atau meningkat sebesar 15,63%. Sementara itu, telur ayam ras mengalami kenaikan secara kumulatif sebesar 4,17%, meskipun menunjukkan perubahan harga yang cukup bervariasi setiap bulan. Peningkatan permintaan setelah berakhirnya masa libur sekolah, termasuk kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan harga protein hewani. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara pemasok, peternak, distributor, dan pihak terkait agar perubahan kebutuhan pasar dapat diantisipasi tanpa menimbulkan gejolak harga yang berlebihan.
- Kenaikan harga beberapa komoditas pangan lainnya berpotensi memperluas tekanan harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain cabai rawit merah, kenaikan harga kumulatif selama Triwulan III juga terjadi pada jeruk sebesar 27,78%, tepung terigu Segitiga Biru sebesar 20,00%, pisang sebesar 16,67%, udang sebesar 10,00%, serta minyak goreng kemasan sebesar 9,09%. Peningkatan harga pada sejumlah komoditas tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga tidak hanya terjadi pada kelompok hortikultura, tetapi juga mulai terlihat pada beberapa bahan pangan olahan, komoditas perikanan, dan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, pemantauan harga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh agar kenaikan pada komoditas tertentu dapat segera diidentifikasi dan diantisipasi.
- Kelancaran distribusi dan kesinambungan pasokan pangan masih memerlukan penguatan, terutama pada komoditas dengan tingkat ketergantungan antardaerah yang tinggi. Perubahan harga yang cukup tajam pada cabai rawit merah dan sejumlah komoditas strategis lainnya menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pemantauan stok di tingkat distributor serta pengawasan rantai pasok dari daerah penghasil menuju Pasar Banjar. Meskipun kegiatan pemantauan ketersediaan pangan telah dilaksanakan, masih diperlukan penguatan kerja sama antardaerah, pemetaan jalur distribusi, dan koordinasi dengan pelaku usaha untuk mengantisipasi gangguan pasokan serta mengurangi risiko kenaikan harga akibat perubahan kondisi distribusi.
- Pelaksanaan intervensi stabilisasi harga masih menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan kegiatan, jangkauan pelayanan, dan dukungan anggaran. Selama Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kota Banjar telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), Selasa Pasar Hasil Tani (SAPAHATI), Operasi Pasar Murah (OPM), serta peluncuran Warung Inflasi BESTIE sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Namun, untuk memperluas jangkauan dan menjaga kesinambungan program tersebut diperlukan dukungan anggaran serta

perencanaan yang memadai. Keterbatasan sumber daya anggaran berpotensi menjadi kendala dalam meningkatkan frekuensi intervensi, terutama apabila terjadi kenaikan harga secara bersamaan pada beberapa komoditas strategis. Oleh karena itu, diperlukan penetapan prioritas kegiatan berdasarkan perkembangan harga dan tingkat kebutuhan masyarakat.
    - Koordinasi dan sinkronisasi program pengendalian inflasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih perlu dioptimalkan. Meskipun koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID Kota Banjar telah dilaksanakan sebanyak empat kali selama Triwulan III Tahun 2026, efektivitas pengendalian inflasi masih memerlukan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program antarpemangku kepentingan.
    - Pemanfaatan data harga dan pasokan pangan sebagai dasar pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.
    - Keberlanjutan dan efektivitas Warung Inflasi BESTIE masih memerlukan penguatan pengelolaan dan evaluasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

- Pelaksanaan Selasa Pasar Hasil Tani (SAPAHATI), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Jambore Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada tanggal 16 Juli 2026, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan kegiatan Selasa Pasar Hasil Tani (SAPAHATI), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Jambore Kelompok Wanita Tani (KWT) yang bertempat di halaman Perkantoran Purwaharja. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok melalui penyediaan komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan SAPAHATI menjadi sarana untuk mempertemukan petani dan produsen pangan lokal dengan konsumen secara langsung sehingga dapat memperpendek rantai pemasaran dan meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Pelaksanaan kegiatan yang dipadukan dengan Jambore KWT juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelompok wanita tani dalam pengembangan produk pertanian lokal, memperluas akses pemasaran hasil produksi, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjar berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan.
- Peluncuran Warung Inflasi BESTIE Kota Banjar. Pada tanggal 29 Juli 2026, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan peluncuran Warung Inflasi BESTIE (Belanja Ekonomis, Sembako Terjangkau, Stabilitas Harga Efektif Terkendali) sebagai salah satu inovasi daerah dalam mendukung stabilisasi harga kebutuhan pokok. Program Warung Inflasi BESTIE diarahkan untuk memberikan alternatif akses masyarakat terhadap komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau serta menjadi instrumen pendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah. Keberadaan Warung Inflasi BESTIE diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, meningkatkan keterjangkauan harga, serta memperkuat mekanisme stabilisasi harga melalui penyediaan bahan kebutuhan pokok secara berkelanjutan. Program ini juga menjadi bentuk pengembangan kebijakan pengendalian inflasi yang tidak hanya mengandalkan kegiatan pasar murah secara berkala, tetapi berupaya menghadirkan sarana pelayanan kebutuhan pokok yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih berkesinambungan.
- Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) pada Agustus 2026. Pemerintah Kota Banjar melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) pada tanggal 16–18 Agustus 2026,

bertempat di Taman Kota Banjar. Pelaksanaan OPM merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pada saat terjadi peningkatan tekanan harga pangan sebagaimana tercermin dari perkembangan IPH Kota Banjar yang mulai menunjukkan nilai positif selama Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan menyediakan alternatif akses pembelian bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, membantu menjaga daya beli masyarakat, serta mengantisipasi potensi kenaikan harga pada komoditas pangan strategis. Pelaksanaan OPM juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons perubahan kondisi pasar secara langsung melalui kegiatan stabilisasi harga yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

- Pelaksanaan SAPAHATI, GPM, dan OPM pada September 2026. Pemerintah Kota Banjar kembali melaksanakan kegiatan Selasa Pasar Hasil Tani (SAPAHATI), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Operasi Pasar Murah (OPM) yang berlokasi di Kecamatan Banjar Pada tanggal 21–22 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memperkuat upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang akhir Triwulan III Tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan secara terpadu diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap komoditas pangan dengan harga terjangkau, meningkatkan pemasaran hasil pertanian lokal, serta mendukung keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk respons Pemerintah Kota Banjar terhadap perkembangan harga pangan yang masih menunjukkan tekanan kenaikan pada sejumlah komoditas, terutama kelompok pangan bergejolak (volatile food)
- Pemerintah Kota Banjar melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar sebanyak 6 kali selama Triwulan III Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Juli 2026 : tanggal 2 dan 30 Juli
    2. Agustus 2026 : tanggal 3 dan 28 Agustus.
    3. September 2026 : tanggal 1 dan 28 September. Kegiatan sidak pasar dilaksanakan sebagai langkah pengawasan langsung terhadap perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di tingkat pedagang. Pemantauan difokuskan pada komoditas pangan strategis yang memiliki potensi fluktuasi harga, antara lain beras, cabai merah, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging ayam broiler, telur ayam ras, dan kebutuhan pangan lainnya. Selain itu sidak juga bertujuan memperoleh informasi kondisi pasar secara aktual, pelaksanaan sidak pasar juga menjadi sarana deteksi dini terhadap potensi kelangkaan pasokan, perubahan harga yang tidak wajar, serta hambatan distribusi yang dapat memengaruhi keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

2. Ketersediaan Pasokan

- Penguatan Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) à Pemerintah Kota Banjar terus mendorong pelaksanaan Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat. Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya komoditas pangan strategis, khususnya cabai rawit dan berbagai komoditas hortikultura lainnya yang berpotensi memengaruhi perkembangan harga pangan daerah. Pelaksanaan program melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) serta masyarakat umum melalui pemanfaatan potensi lahan pekarangan sebagai sumber produksi pangan skala rumah tangga. Melalui program PAKAYA, Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan kemandirian pangan masyarakat, memperkuat ketersediaan komoditas pangan lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap

pasokan dari luar daerah dalam jangka menengah dan panjang..

- Pada tanggal 19 Agustus 2026, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan kegiatan Gerakan Menanam Bawang di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya penguatan produksi komoditas hortikultura lokal, khususnya bawang, yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan termasuk kelompok komoditas yang rentan mengalami fluktuasi harga. Gerakan menanam bawang diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi pertanian lokal, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengembangan komoditas strategis, serta mendukung diversifikasi produksi pangan daerah. Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Banjar berupaya memperkuat ketahanan pasokan bawang dan secara bertahap mengurangi kerentanan terhadap perubahan pasokan dari daerah penghasil lainnya.
- Penyaluran Bantuan Benih Ikan Air Tawar kepada Pokdakan dan KWT pada Triwulan III 2026. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan sumber protein hewani dan memperkuat ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan benih ikan air tawar kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) selama Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan sektor perikanan budidaya berbasis masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi ikan konsumsi, mengembangkan potensi perikanan lokal, serta mendukung kesinambungan ketersediaan pangan di Kota Banjar. Penyaluran bantuan dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada tanggal 28 Juli 2026 kepada 5 kelompok penerima manfaat, yang terdiri atas 2 Pokdakan dan 3 KWT di Kota Banjar. Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2026, Pemerintah Kota Banjar menyalurkan bantuan benih ikan nila kepada 3 kelompok penerima, yaitu KWT Laksana Jaya di Kelurahan Purwaharja, Pokdakan Berkah Tani di Kelurahan Situbatu, dan Pokdakan Mina Cimanggu di Desa Batulawang. Kemudian, pada tanggal 28 Agustus 2026, dilaksanakan penyaluran bantuan benih ikan gurame kepada 3 kelompok pembudidaya, yaitu Pokdakan Berkah Jaya di Desa Raharja, Pokdakan Karya Mandiri di Desa Neglasari, dan Pokdakan Karya Jaya di Kelurahan Banjar. Dengan demikian, secara keseluruhan kegiatan penyaluran bantuan benih ikan selama Triwulan III Tahun 2026 tercatat mencakup 11 kelompok penerima kegiatan, terdiri atas 5 kelompok pada Juli dan 6 kelompok pada Agustus. Pelaksanaan program tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya, memperkuat kapasitas kelompok penerima dalam menghasilkan ikan konsumsi, serta mendorong pemberdayaan dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pengembangan budidaya ikan air tawar diharapkan dapat memperluas sumber pasokan pangan lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan ikan dari luar daerah, serta mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Dalam jangka menengah dan panjang, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kemandirian dan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung stabilitas ketersediaan pasokan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi di Kota Banjar
- Penguatan Ketersediaan Beras melalui Monitoring Penyaluran Beras SPHP. Pada tanggal 23 September 2026, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan kegiatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke kios-kios di wilayah Kota Banjar. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah mendukung ketersediaan dan keterjangkauan beras sebagai komoditas pangan pokok yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penyaluran beras SPHP diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pasokan beras pada saluran distribusi tingkat konsumen, memberikan alternatif akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau, serta membantu menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Pelaksanaan kegiatan ini juga

menjadi bagian dari upaya antisipatif dalam mempertahankan stabilitas harga beras yang selama Triwulan III Tahun 2026 relatif terjaga, dengan harga beras medium sebesar Rp13.500/kg dan beras premium sebesar Rp14.900/kg berdasarkan hasil pemantauan harga.

3. Kelancaran Distribusi

- Pemantauan Ketersediaan Bahan Pangan di Tingkat Distributor. Pemerintah Kota Banjar melaksanakan pemantauan ketersediaan bahan pangan di tingkat distributor sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi dan kesinambungan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Pemantauan tersebut diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan stok, kondisi ketersediaan komoditas pangan, serta potensi hambatan pengiriman yang dapat memengaruhi harga di tingkat konsumen. Kegiatan ini memiliki peran penting mengingat sebagian kebutuhan pangan Kota Banjar masih bergantung pada pasokan dari daerah lain, antara lain cabai dari Garut dan Wonosobo, bawang merah dari Garut, Sumenep, Brebes, dan Majalengka, serta berbagai komoditas pangan lainnya dari wilayah pemasok. Melalui pemantauan di tingkat distributor, pemerintah daerah berupaya memperkuat deteksi dini terhadap risiko gangguan pasokan dan menyediakan informasi yang diperlukan dalam menentukan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.
- Penguatan Distribusi Beras SPHP melalui Kios-Kios di Kota Banjar. Pelaksanaan penyaluran beras SPHP pada tanggal 23 September 2026 ke kios-kios di Kota Banjar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kelancaran distribusi pangan strategis. Pemanfaatan kios sebagai saluran distribusi bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP serta mendukung penyaluran pasokan melalui jaringan penjualan yang lebih dekat dengan konsumen. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan ketersediaan beras di pasar dan mengurangi risiko gangguan pasokan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga.
- Penguatan Informasi Rantai Pasok dan Kondisi Ketersediaan Pangan. Melalui kegiatan pemantauan harga di Pasar Banjar, pengawasan ketersediaan bahan pangan, serta pengumpulan informasi di tingkat distributor, Pemerintah Kota Banjar melakukan pengamatan terhadap hubungan antara perkembangan harga pasar dan kondisi pasokan komoditas strategis. Perhatian khusus diarahkan pada komoditas yang menunjukkan volatilitas harga relatif tinggi selama Triwulan III, terutama cabai rawit merah, bawang merah, daging ayam broiler, dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi potensi gangguan distribusi, mengevaluasi kebutuhan pasokan, serta mendukung koordinasi dengan pelaku usaha dan daerah pemasok untuk menjaga kelancaran arus barang kebutuhan pokok.

4. Komunikasi Efektif

- ***High Level Meeting*** Pemerintah Kota Banjar dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar perihal pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan sebanyak 4 kali pada triwulan III 2026 (9 Juli, 13 Agustus, 15 September dan 23 September 2026). Kegiatan HLM dilaksanakan sebagai forum koordinasi strategis dalam merumuskan arah kebijakan pengendalian inflasi daerah berdasarkan perkembangan kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di Kota Banjar. Pelaksanaan HLM secara berkala juga mendukung proses evaluasi kondisi perkembangan harga, penyampaian informasi dari perangkat daerah terkait, dan perumusan langkah pengendalian yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah à Pemerintah Kota Banjar secara berkelanjutan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional dan Rakor Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan pertukaran informasi mengenai perkembangan harga komoditas pangan, kondisi ketersediaan pasokan, permasalahan distribusi, serta berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilaksanakan di masing-masing daerah. Partisipasi dalam rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mendukung penyelarasan langkah pengendalian inflasi berdasarkan

- Pelaporan Perkembangan Harga Pangan Secara Harian melalui Sistem Informasi Digital meliputi:
    1. Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SiLinda) Jawa Barat.
    2. Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Simawas Pagi).
    3. Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Pelaksanaan pelaporan tersebut bertujuan menyediakan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok secara berkala, sekaligus mendukung pemantauan terhadap perubahan harga komoditas pangan strategis yang berpotensi memengaruhi kondisi inflasi daerah. Data yang dihimpun melalui sistem informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perkembangan harga, identifikasi komoditas yang mengalami kenaikan atau penurunan signifikan, serta dasar pertimbangan dalam menentukan kebutuhan intervensi pengendalian inflasi.
- Publikasi Informasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok kepada Masyarakat à Dalam rangka meningkatkan transparansi informasi harga dan memperluas akses masyarakat terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinas KUKMP) melaksanakan publikasi informasi harga pangan melalui media sosial dan papan informasi harga yang tersedia di kawasan Alun-Alun Kota Banjar.
- Penguatan Koordinasi dan Pemantauan Perkembangan Harga sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan à Selama Triwulan III Tahun 2026, koordinasi pengendalian inflasi daerah didukung oleh pelaksanaan HLM, rapat koordinasi tingkat provinsi, pemantauan langsung kondisi pasar, pemantauan ketersediaan pasokan di tingkat distributor, serta pelaporan dan publikasi harga pangan secara harian. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi instrumen penting dalam penyediaan informasi bagi Pemerintah Kota Banjar untuk mengidentifikasi perkembangan harga komoditas strategis dan mempertimbangkan langkah pengendalian inflasi sesuai kondisi pasar. Melalui penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan ketepatan respons kebijakan, memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi gejolak harga, serta menjaga kesinambungan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah. Pengawasan peredaran barang dan jasa di Kota Banjar à Pengawasan peredaran barang dan jasa merupakan bagian dari upaya mendukung terciptanya kondisi perdagangan yang tertib serta menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas pasar. Pengawasan ini untuk memastikan kelancaran peredaran barang kebutuhan pokok, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan, serta mengantisipasi potensi praktik perdagangan yang dapat mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan harga barang

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

-

a. Keterjangkauan Harga (K1)

1. Pelaksanaan Selasa Pasar Hasil Tani (SAPAHATI), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Jambore Kelompok Wanita Tani (KWT) pada 16 Juli 2026 merupakan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut juga memberikan ruang pemasaran bagi petani dan produsen pangan lokal melalui pertemuan langsung dengan konsumen. Penggabungan kegiatan stabilisasi harga dengan pemberdayaan kelompok tani menjadi pendekatan yang dapat mendukung keterjangkauan pangan sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian lokal. Namun, diperlukan evaluasi terhadap volume komoditas yang dipasarkan, jumlah masyarakat penerima manfaat, dan selisih harga dengan pasar untuk mengukur kontribusi kegiatan secara lebih objektif.
2. Warung Inflasi BESTIE merupakan inovasi Pemerintah Kota Banjar dalam mengembangkan instrumen stabilisasi harga yang berpotensi dilaksanakan secara lebih berkelanjutan dibandingkan kegiatan pasar murah yang bersifat periodik. Keberadaan program ini diharapkan dapat memperluas alternatif akses masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Meskipun demikian, efektivitas program masih perlu diperkuat melalui evaluasi terhadap kesinambungan stok, variasi komoditas, keterjangkauan lokasi, jumlah transaksi, serta kemampuan mempertahankan harga jual yang kompetitif. Penguatan tata kelola dan dukungan pasokan menjadi faktor penting agar Warung Inflasi BESTIE dapat memberikan manfaat secara konsisten.
3. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) pada 16–18 Agustus 2026 di Taman Kota Banjar merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap meningkatnya tekanan harga pangan pada Agustus. Meskipun intervensi pasar telah dilaksanakan, IPH Kota Banjar masih menunjukkan peningkatan dari 1,68 pada minggu pertama menjadi 2,63 pada minggu keempat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih berlangsung selama periode intervensi, sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketepatan waktu, cakupan wilayah, jumlah komoditas, dan volume barang yang disediakan. Namun, peningkatan IPH tersebut tidak secara langsung menunjukkan bahwa pelaksanaan OPM tidak efektif karena perkembangan harga juga dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan permintaan pasar.
4. Pelaksanaan kembali SAPAHATI, GPM, dan OPM pada 21–22 September 2026 di Kecamatan Banjar menunjukkan keberlanjutan upaya stabilisasi harga hingga akhir triwulan. Kegiatan ini menjadi langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau, sekaligus memberikan alternatif pemasaran bagi hasil pertanian lokal. Pada September, IPH masih berada pada zona positif dengan nilai 1,51 pada minggu keempat, meskipun lebih rendah dibandingkan puncak Agustus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih memerlukan perhatian. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pasar murah perlu terus disesuaikan dengan hasil pemantauan harga dan kebutuhan masyarakat, terutama terhadap komoditas yang mengalami kenaikan signifikan.
5. Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar sebanyak 6 kali selama Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan keberlanjutan pengawasan pemerintah daerah terhadap perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok. Kegiatan ini mendukung identifikasi dini terhadap potensi kenaikan harga, kelangkaan barang, serta hambatan distribusi di tingkat pedagang. Namun, hasil pengawasan perlu ditindaklanjuti melalui langkah yang lebih terukur, khususnya apabila ditemukan komoditas dengan perubahan harga signifikan. Penguatan dokumentasi hasil sidak, identifikasi penyebab kenaikan harga, dan tindak lanjut bersama distributor maupun perangkat daerah terkait diperlukan agar kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat pemantauan, tetapi juga

mendukung pengambilan keputusan pengendalian inflasi.

6. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan keterjangkauan harga selama Triwulan III telah mencakup berbagai bentuk intervensi, baik melalui kegiatan pasar murah maupun pengembangan Warung Inflasi BESTIE. Meskipun demikian, kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya cabai rawit merah yang meningkat sebesar 56,25% secara kumulatif selama triwulan, menunjukkan masih adanya risiko tekanan harga yang perlu diantisipasi. Ke depan, kegiatan stabilisasi harga perlu lebih diarahkan pada intervensi yang bersifat preventif, berbasis data, dan diprioritaskan pada komoditas yang memberikan tekanan terbesar terhadap perkembangan harga pangan

b. Ketersediaan Pasokan (K2) à

1. Penguatan Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) selama Triwulan III Tahun 2026 merupakan upaya mendukung peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat, khususnya untuk budidaya cabai dan komoditas hortikultura lainnya. Program ini memiliki potensi dalam memperkuat kemandirian pangan rumah tangga serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Namun, kontribusi program terhadap stabilitas pasokan dan harga belum dapat diukur secara menyeluruh karena diperlukan data mengenai luas lahan yang dimanfaatkan, jumlah peserta aktif, produktivitas tanaman, dan hasil panen. Oleh karena itu, pelaksanaan PAKAYA perlu disertai pendampingan serta evaluasi hasil produksi secara berkala.
2. Pelaksanaan Gerakan Menanam Bawang pada 19 Agustus 2026 di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, merupakan langkah penguatan produksi hortikultura lokal untuk mendukung ketersediaan komoditas strategis. Kegiatan tersebut relevan dengan kondisi Kota Banjar yang masih bergantung pada pasokan bawang dari sejumlah daerah penghasil. Meskipun harga bawang merah mengalami penurunan sebesar 28,89% secara kumulatif selama Triwulan III, penguatan produksi lokal tetap diperlukan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan pasokan pada periode berikutnya. Efektivitas gerakan menanam bawang perlu dievaluasi melalui perkembangan luas tanam, keberhasilan budidaya, produktivitas, dan hasil panen sehingga manfaat program terhadap ketahanan pasokan dapat diukur secara lebih jelas.
3. Penyaluran bantuan benih ikan air tawar kepada Pokdakan dan KWT selama Juli dan Agustus 2026 merupakan bentuk penguatan sektor perikanan budidaya dalam mendukung ketersediaan pangan sumber protein hewani. Bantuan tersebut tercatat mencakup 11 kelompok penerima kegiatan, terdiri atas 5 kelompok pada Juli dan 6 kelompok pada Agustus, dengan jenis bantuan antara lain benih ikan nila dan gurame. Program ini berpotensi meningkatkan kapasitas produksi ikan konsumsi, memperkuat usaha budidaya masyarakat, serta mendukung diversifikasi sumber pangan lokal. Namun, manfaatnya terhadap peningkatan ketersediaan pasokan belum dapat dinilai secara langsung karena keberhasilan budidaya memerlukan waktu hingga masa panen. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan teknis dan pemantauan terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan, pertumbuhan, hasil panen, serta perkembangan usaha kelompok penerima.
4. Pelaksanaan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui kios-kios di Kota Banjar pada 23 September 2026 merupakan salah satu langkah penguatan ketersediaan beras sebagai komoditas pangan pokok masyarakat. Selama Triwulan III, harga beras medium relatif stabil pada Rp13.500/kg dan beras premium sebesar Rp14.900/kg. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beras tidak mengalami kenaikan harga selama periode pengamatan. Namun, stabilitas harga tersebut tidak

dapat sepenuhnya dikaitkan dengan penyaluran SPHP karena dipengaruhi pula oleh kondisi produksi, pasokan, dan distribusi. Ke depan, pemantauan penyaluran SPHP perlu mencakup kecukupan stok, volume distribusi, keterjangkauan harga, dan pemerataan akses masyarakat.

5. Berbagai program penguatan ketersediaan pasokan yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, baik melalui sektor pertanian maupun perikanan. Namun, sebagian besar manfaat program tersebut bersifat jangka menengah dan panjang sehingga belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan stabilisasi harga dalam periode triwulan yang sama. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pasokan komoditas tertentu dari luar daerah masih menjadi tantangan, terutama pada kelompok hortikultura yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara program peningkatan produksi lokal, pemetaan kebutuhan pangan, penguatan kerja sama antardaerah, dan pemantauan stok untuk menjamin kesinambungan pasokan

c. Kelancaran Distribusi (K3)

1. Pelaksanaan pemantauan ketersediaan bahan pangan di tingkat distributor selama Triwulan III Tahun 2026 merupakan langkah penting dalam mendukung kelancaran distribusi dan menjaga kesinambungan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan ini memberikan informasi mengenai kondisi stok, perkembangan pasokan, serta potensi hambatan pengiriman yang dapat memengaruhi harga di tingkat konsumen. Namun, efektivitas pemantauan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem pendataan dan mekanisme tindak lanjut apabila ditemukan indikasi gangguan distribusi atau penurunan stok komoditas strategis.
2. Ketergantungan Kota Banjar terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas distribusi. Komoditas seperti cabai merah dan cabai rawit merah berasal dari Garut dan Wonosobo, sedangkan bawang merah dipasok dari Garut, Sumenep, Brebes, dan Majalengka. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan harga di Kota Banjar sensitif terhadap perubahan produksi, harga di tingkat pemasok, dan kelancaran pengiriman dari daerah penghasil. Kenaikan harga cabai rawit merah yang mencapai 56,25% selama Triwulan III menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi pasokan antardaerah, meskipun kenaikan tersebut belum dapat dipastikan semata-mata disebabkan oleh gangguan distribusi.
3. Penguatan distribusi beras SPHP melalui kios-kios di Kota Banjar pada September 2026 merupakan salah satu upaya mendekatkan akses bahan pangan strategis kepada masyarakat. Pemanfaatan jaringan kios dapat mendukung penyaluran beras melalui saluran distribusi yang lebih dekat dengan konsumen. Meskipun demikian, efektivitas kegiatan perlu diukur berdasarkan jumlah kios yang menerima pasokan, volume beras yang disalurkan, kesinambungan stok, serta pemerataan distribusi di setiap wilayah. Pemantauan tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran beras SPHP dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung stabilitas harga secara berkelanjutan.
4. Kegiatan pemantauan harga di Pasar Banjar dan pengumpulan informasi ketersediaan pangan di tingkat distributor telah mendukung identifikasi komoditas yang mengalami fluktuasi harga. Namun, penguatan informasi rantai pasok masih diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sumber tekanan harga secara lebih akurat, baik yang berasal dari perubahan produksi, permintaan, harga pemasok, maupun biaya distribusi. Integrasi data harga dan stok perlu diperkuat untuk mendukung penyusunan langkah antisipasi yang lebih cepat, terutama pada komoditas pangan bergejolak

d. Komunikasi Efektif (K4)

1. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Banjar sebanyak 4 kali selama Triwulan III Tahun 2026, yaitu pada 9 Juli, 13 Agustus, 15 September, dan 23 September 2026, menunjukkan keberlanjutan koordinasi strategis dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah. Forum tersebut berperan sebagai sarana pembahasan perkembangan harga, identifikasi permasalahan pasokan, serta perumusan langkah pengendalian inflasi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Namun, efektivitas pelaksanaan HLM perlu terus ditingkatkan melalui penguatan tindak lanjut hasil rapat, penetapan rencana aksi yang terukur, pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah, serta evaluasi realisasi kebijakan secara berkala.
2. Partisipasi Pemerintah Kota Banjar dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Koordinasi Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan tersebut mendukung pertukaran informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan pasokan, dan potensi gangguan distribusi. Namun, hasil koordinasi perlu dioptimalkan menjadi langkah operasional di tingkat daerah, khususnya dalam penyusunan prioritas intervensi, penguatan pasokan, serta antisipasi perubahan harga komoditas strategis.
3. Pelaporan perkembangan harga pangan secara harian melalui SiLinda Jabar, Simawas Pagi, dan SP2KP telah mendukung penyediaan informasi harga kebutuhan pokok secara berkala. Ketersediaan data tersebut memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap perubahan harga antarperiode, mengidentifikasi komoditas berisiko, dan mengamati dinamika perkembangan IPH. Namun, pemanfaatan data masih perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi instrumen pelaporan, tetapi juga digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengembangan analisis tren harga, integrasi data stok, dan sistem peringatan dini diperlukan untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi yang lebih preventif dan responsif.
4. Publikasi perkembangan harga bahan kebutuhan pokok melalui media sosial Dinas KUKMP dan papan informasi harga di kawasan Alun-Alun Kota Banjar merupakan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi informasi pasar kepada masyarakat. Penyampaian informasi secara berkala memberikan referensi harga bagi konsumen dan mendukung keterbukaan informasi perdagangan. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi publik perlu ditingkatkan melalui perluasan jangkauan informasi, penyajian data yang lebih mudah dipahami, serta edukasi masyarakat mengenai konsumsi bijak dan pemanfaatan pangan lokal.
5. Penguatan koordinasi dan pemantauan perkembangan harga telah didukung melalui berbagai kegiatan, termasuk HLM TPID, rapat koordinasi pengendalian inflasi, sidak pasar, pemantauan stok distributor, serta pelaporan harga pangan. Namun, perubahan IPH dari zona negatif pada Juli menjadi positif pada Agustus dan September menunjukkan bahwa kebijakan memerlukan respons yang adaptif terhadap perkembangan kondisi pasar. Koordinasi lintas sektor perlu diarahkan pada mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cepat, peningkatan sinkronisasi program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemantauan tindak lanjut terhadap komoditas yang menunjukkan tekanan kenaikan harga.
6. Pengawasan peredaran barang dan jasa perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban perdagangan, perlindungan konsumen, serta kelancaran peredaran kebutuhan pokok. Pengawasan tersebut penting untuk mengantisipasi potensi praktik perdagangan yang dapat mengganggu ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Namun, evaluasi terhadap capaian pengawasan memerlukan dokumentasi mengenai

jumlah kegiatan pemeriksaan, hasil temuan, serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Penguatan koordinasi antara perangkat daerah terkait dan pelaku usaha diperlukan untuk mendukung terciptanya kondisi perdagangan yang tertib dan stabil

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan SAPAHATI yang telah dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2026, dengan memperhatikan jumlah penerima manfaat, volume komoditas yang disalurkan, selisih harga dengan harga pasar, serta perkembangan harga setelah pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan mekanisme intervensi agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat.
2. Mengoptimalkan operasional dan keberlanjutan Warung Inflasi BESTIE yang telah diluncurkan pada 29 Juli 2026 melalui penguatan manajemen stok, penentuan komoditas prioritas, evaluasi harga jual, serta pengembangan kemitraan dengan distributor dan produsen pangan. Optimalisasi tersebut diarahkan agar Warung Inflasi BESTIE dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga yang berkelanjutan dan tidak hanya menjadi alternatif penyediaan kebutuhan pokok pada periode tertentu.
3. Memperkuat langkah stabilisasi harga cabai rawit merah sebagai komoditas prioritas pengendalian inflasi pada Triwulan IV Tahun 2026, mengingat kenaikan harga kumulatif sebesar 56,25% selama Triwulan III. Pengendalian perlu difokuskan pada pemantauan pasokan dari daerah penghasil, penguatan koordinasi dengan distributor, serta penyiapan langkah intervensi apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan atau indikasi penurunan ketersediaan stok.
4. Meningkatkan efektivitas SAPAHATI melalui penguatan kemitraan pemasaran antara petani, Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku usaha, dan konsumen, dengan mendorong kesinambungan pasokan hasil pertanian lokal serta pengembangan mekanisme pemasaran langsung yang lebih terstruktur. Upaya ini bertujuan meningkatkan manfaat ekonomi bagi petani sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar yang telah dilakukan sebanyak enam kali selama Triwulan III, dengan menitikberatkan pada identifikasi komoditas yang mengalami perubahan harga signifikan, permasalahan ketersediaan stok, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan. Hasil sidak perlu dirumuskan menjadi rekomendasi teknis yang dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Menanam Bawang di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, melalui pendataan perkembangan tanaman, luas tanam, produktivitas, dan proyeksi hasil panen. Hasil pemantauan dijadikan dasar untuk menentukan kelayakan pengembangan kegiatan pada wilayah potensial lainnya guna memperkuat produksi bawang lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.
7. Meningkatkan efektivitas Program Pekarangan Sagala Aya (PAKAYA) melalui penguatan pendampingan dan evaluasi hasil produksi, khususnya pada komoditas cabai dan hortikultura yang memiliki tingkat fluktuasi harga tinggi. Program perlu diarahkan agar hasil budidaya tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpotensi meningkatkan ketersediaan pangan lokal melalui pengembangan produksi yang berkelanjutan.
8. Melaksanakan monitoring pascapenyaluran bantuan benih ikan air tawar kepada Pokdakan dan KWT yang telah dilaksanakan pada Juli dan Agustus 2026, dengan

memperhatikan tingkat keberhasilan budidaya, pertumbuhan ikan, kebutuhan sarana produksi, serta proyeksi hasil panen. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan yang diberikan memberikan manfaat terhadap peningkatan produksi perikanan dan penguatan ketersediaan pangan sumber protein hewani.

9. Mengoptimalkan pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah disalurkan melalui kios-kios di Kota Banjar, dengan memastikan kesinambungan stok, kesesuaian harga jual dengan ketentuan, serta pemerataan distribusi kepada masyarakat. Pengawasan tersebut perlu disertai evaluasi terhadap volume penyaluran dan kondisi harga beras di pasar untuk mempertahankan stabilitas harga yang telah terjaga selama Triwulan III.
10. Memperkuat pengendalian harga komoditas protein hewani melalui koordinasi kebutuhan pasokan dengan peternak, distributor, dan penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk komoditas daging ayam broiler dan telur ayam ras. Koordinasi diarahkan pada penyusunan proyeksi kebutuhan secara berkala agar perubahan permintaan, termasuk pada masa kegiatan sekolah dan libur sekolah, dapat diantisipasi tanpa menimbulkan ketidakseimbangan pasokan dan gejolak harga.
11. Menindaklanjuti penguatan kerja sama antardaerah (KAD) melalui koordinasi teknis dan penyusunan mekanisme penyediaan pasokan dengan daerah penghasil komoditas strategis, terutama cabai dan bawang. Kerja sama perlu diarahkan pada pengembangan kesepakatan pasokan, pertukaran informasi produksi dan harga, serta penyiapan alternatif sumber pasokan apabila terjadi gangguan distribusi dari daerah pemasok utama.
12. Mengembangkan mekanisme pengamanan pasokan pangan menjelang akhir tahun 2026 melalui pemetaan kebutuhan konsumsi, pemantauan stok distributor, identifikasi komoditas berisiko, serta koordinasi dengan Perum Bulog dan pelaku usaha pangan. Langkah antisipatif tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesiapan Kota Banjar dalam menghadapi kemungkinan perubahan permintaan dan gangguan pasokan pada Triwulan IV.
13. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas jalur distribusi pangan dan menindaklanjuti hambatan logistik yang telah diidentifikasi pada periode sebelumnya, termasuk koordinasi dengan perangkat daerah terkait mengenai kondisi infrastruktur pendukung distribusi. Prioritas tindak lanjut diarahkan pada jalur distribusi komoditas strategis yang memiliki risiko keterlambatan pasokan atau peningkatan biaya pengiriman.
14. Meningkatkan pemanfaatan data SiLinda Jabar, Simawas Pagi, dan SP2KP melalui penyusunan analisis perkembangan harga dan pasokan secara berkala, dengan mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga berulang, perubahan harga yang tidak wajar, serta potensi ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Hasil analisis perlu disajikan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami sebagai bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam menentukan langkah pengendalian inflasi.
15. Menindaklanjuti pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) melalui penetapan indikator dan ambang batas kewaspadaan harga komoditas strategis, yang dilengkapi dengan mekanisme penyampaian informasi dan tindak lanjut apabila ditemukan indikasi gejolak harga. Sistem tersebut diharapkan dapat mempercepat respons TPID dalam menentukan kebutuhan intervensi sebelum tekanan harga semakin meningkat.
16. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil High Level Meeting (HLM) TPID Kota Banjar yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali selama Triwulan III Tahun 2026, melalui penyusunan matriks rencana aksi yang memuat permasalahan prioritas, langkah penanganan, perangkat daerah penanggung jawab, target penyelesaian, serta perkembangan realisasi kegiatan. Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan setiap

hasil koordinasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan operasional yang terukur.

17. Memperkuat sinkronisasi pelaksanaan program pengendalian inflasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengintegrasikan kegiatan stabilisasi harga, peningkatan produksi, penguatan distribusi, dan komunikasi publik dalam rencana aksi TPID yang terpadu. Sinkronisasi diarahkan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mempercepat penanganan permasalahan harga pangan yang memerlukan keterlibatan lintas sektor.
18. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pengendalian inflasi berdasarkan evaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan, dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki sasaran jelas, jangkauan manfaat yang terukur, dan relevansi tinggi terhadap komoditas penyumbang tekanan harga. Selain itu, perlu disiapkan mekanisme perencanaan anggaran yang lebih adaptif, sesuai ketentuan yang berlaku, untuk mendukung kesiapan pelaksanaan intervensi apabila terjadi gejolak harga secara mendadak.
19. Mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih informatif dan edukatif, dengan tidak hanya menyampaikan perkembangan harga kebutuhan pokok melalui media sosial dan papan informasi, tetapi juga menyediakan informasi alternatif komoditas pangan, lokasi pelaksanaan program pangan terjangkau, serta edukasi mengenai pemanfaatan pangan lokal. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendukung pola konsumsi yang lebih adaptif terhadap perubahan harga.
20. Meningkatkan pengawasan dan penguatan kepatuhan pelaku usaha dalam peredaran barang dan jasa, terutama pada komoditas kebutuhan pokok yang berpotensi mengalami kelangkaan atau kenaikan harga signifikan. Pengawasan perlu didukung dengan koordinasi antarinstansi, dokumentasi hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga ketertiban perdagangan dan perlindungan konsumen.
21. Menyusun evaluasi kinerja pengendalian inflasi berbasis indikator hasil (outcome-based evaluation), dengan mengukur tidak hanya jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga perubahan harga komoditas sasaran, jangkauan penerima manfaat, kecukupan pasokan, kesinambungan distribusi, dan efektivitas penggunaan sumber daya. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi program yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau disesuaikan pada periode berikutnya.
22. Memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi pada Triwulan IV Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi perkembangan IPH, yang masih berada pada zona positif hingga minggu keempat September sebesar 1,51. Langkah pengendalian perlu difokuskan pada kesiapan pasokan komoditas pangan bergejolak, pemantauan perkembangan harga secara lebih intensif, serta penyiapan respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi apabila terjadi peningkatan tekanan harga menjelang akhir tahun.
23. Mendorong penguatan kelembagaan TPID Kota Banjar melalui penyusunan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut kebijakan secara terpadu, sehingga setiap program yang telah dilaksanakan dapat dipantau kesinambungan dan hasilnya. Penguatan tersebut diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan serta memastikan rekomendasi pengendalian inflasi pada setiap triwulan menjadi dasar perbaikan program pada periode berikutnya